

## ABSTRAK

Hibah dalam Peraturan perundangan-undangan di Indonesia terbagi menjadi dua konsep yaitu hibah dalam hukum privat dan hibah dalam hukum publik. Hibah dalam hukum privat merupakan pemberian benda berharga secara cuma-cuma dari seseorang yang masih hidup kepada seseorang yang masih hidup pula, sedangkan hibah yang diatur dalam hukum publik adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemerintah atau pihak lain kepada pemerintah daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian. Tujuan dari hibah itu sendiri adalah sarana bagi Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun pada pelaksanaannya, seringkali pemberian hibah tersebut disalahgunakan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi. Salah satu bentuk penyalahgunaan hibah adalah adanya orang yang memperdagangkan pengaruh yang tidak baik (broker). Berdasarkan laporan Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) bahwa praktik pemberian hibah ini sangat rawan dan berpotensi merugikan keuangan daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah statute approach, conceptual approach, dan case approach. Adapun yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah konsep mengenai hibah baik itu dalam hukum privat dan hukum publik. Penelitian ini juga membahas bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam pemberian dana hibah. Dari hasil penelitian ini diketahui letak persamaan dan perbedaan dari konsep hibah baik itu dalam hukum privat maupun hukum publik. Selain itu, dalam penelitian ini diketahui pula bahwa pelaku yang terbukti menyalahgunakan dana hibah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang tindak pidana korupsi.

**Kata Kunci:** Hibah, Hukum Privat, Hukum Publik, Korupsi, *Trading In Influence*.

**ABSTRACT**

*Grants in Indonesian legislation are divided into two concepts which are private law and public law. Grants in private law are the giving of free valuable objects from someone who is still alive to someone who is still alive, while grants in public law are gifts with the transfer of rights to something from the government or other parties to the regional government or vice versa which specific designation has been determined and carried out by agreement. The purpose of the grant is a means for the Government to improve the welfare of the community. But in its implementation, the grants are misused which causes corruption. One of misuse of grants is the presence of people who trade brokers. Based on the Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) report that the practice of grant granting is very vulnerable and potential to harm regional finance. The research method used in this research is statute approach, conceptual approach, and case approach. This research discusses the concept of grants in private and public law, and how criminal liability for perpetrators of corruption in granting grants. From the results of this study, it is known where the similarities and differences of the concept of grants in private and public law. In addition, it was also known that the perpetrators who were proven to have misused the grant funds could be held accountable for crimes as stipulated in the Act on criminal acts of corruption.*

**Keywords:** *Grants, Private Law, Public Law, Corruption, Trading In Influence.*